

# **Revitalisasi Pemberantasan Korupsi sebagai Agenda Reformasi**

Marita Ahdiyana

- ▣ Braz (dalam Lubis & Scott, 2002): hampir semua definisi korupsi mengandung 2 unsur:
  1. Penyalahgunaan kekuasaan yg melampaui batas kewajaran hukum oleh pejabat publik atau penyelenggara negara
  2. Pengutamakan kepentingan pribadi/klien pejabat publik

**Pengertian**

- 2006: 2,4 (peringkat 130 dari 163 negara)
- 2007: 2,3 (peringkat 145 dari 180 negara)
- 2008: 2,8
- 2010: 2,8 (peringkat 110 dari 178 negara)
- 2011: 3,0 (peringkat 100 dari 182 negara)
- 2012: 3,2 (peringkat 118 dari 176 negara)

## **Indeks persepsi korupsi Transparansi Internasional**

- Pada awalnya korupsi hampir-hampir hanya menjadi *trademark* lembaga eksekutif
- Kompas 24/1/11: "Aceh Hingga Papua Tersandra Korupsi" , dari 33 Provinsi hanya 5 Provinsi yg tidak terindikasi korupsi hingga tgl. 23/1/2011
- Gamawan F: 290 kepala daerah berstatus tersangka, terpidana, & terdakwa , 251/86,2 % adl kasus korupsi
- Korupsi dilakukan scr sistemik dan melibatkan pelaku yg luas
- Marzuki Alie: korupsi sudah memasuki semua level birokrasi pemerintahan

## Bencana Korupsi

- Kumorotomo: basis terjadinya korupsi adalah konsepsi bahwa semua urusan membutuhkan pengesahan pejabat publik (*raja officialdom*)
- Kasus suap adalah yg paling dominan
- Tim Reformasi birokrasi Nas: suap penerimaan CPNS Rp 35 T/tahun
- Bribe Payer Index 2011: Indonesia adalah negara paling aktif melakukan suap kepada pejabat publik utk menjalankan bisnis

## **Basis tindakan Korupsi**

- ▣ Alatas, 1986: faktor penyebab korupsi:
  1. masalah kepemimpinan
  2. Problem pengajaran agama dan etika
  3. Latar belakang sejarah/kolonialisme
  4. Kualitas pendidikan rendah
  5. Kemiskinan dn gaji rendah
  6. Penegakan hukum yg lemah dan buruk
  7. Sistem kontrol yg tdk efektif
  8. struktur dan sistem pemerintahan
- ▣ Kumorotomo
  1. Cara sistemik struktural
  2. Cara abolisionistik
  3. Cara Moralistik

**Metode pemberantasan**

- ▣ Bgmn agar semua pihak melihat korupsi sbg masalah urgen yg hrs ditangani?
- ▣ John Kingdon  
Problem stream: masy sepakat bhw korupsi adl msl bersama, shg hrs diatasi, shg terbuka window opportunity
- ▣ George Stiglitz: veto player: siapa aktor yang terlibat dlm pengambilan keputusan (aktor utama), akan dinilai sikapnya (pro kontra) Tapi yg plg penting adl dia veto player atau bukan, shg pemain2 penting hrs dianalisis.
- ▣ Metode PRINCE (Coplin dan O'Leary dlm Patton dan Sawicki)  
Isu position: dukungan  
Saliience: pentingnya, melibatkan, mjd bag dr lingk  
Power: seberapa jauh seorang aktor mampu menveto/memblok/merealisasikan alternatif SDM

## Revitalisasi Pemberantasan Korupsi

# Upaya Pemberantasan Sisi Yuridis

- Fase penggunaan KUHP
- Keppres No. 40 Tahun 1957
- Keppres No. 225 Tahun 1957
- Perppu No. 24 Prp 1960 ttg pengusutan, penuntutan, pemeriksaan tipikor
- Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Kepres No. 228 Tahun 1967.
- UU No.3 Tahun 1971 ttg pemberantasan tipikor



- UU No. 31 Tahun 1999 ttg pemberantasan tipikor
- UU No. 20 Tahun 2001
- UU No. 30 Tahun 2002 ttg KPK
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara-raan Negara yang Bersih & Bebas dari KKN.

**Lanjutan**

- Arus dari kekuasaan eksekutif
  - Cicak vs buaya
  - “penyerbuan” kantor KPK
- Arus dari kekuasaan legislatif
  - usulan audit kinerja KPK
  - aksi bintang anggaran tahun 2008 & 2012
  - kewenangan legislasi melalui revisi UU yg berkaitan dg kewenangan KPK

**Hifdzil Alim: upaya pelemahan  
KPK**

- Emerson Yuntho: adalah usaha mempreteli kewenangan KPK
- Tama S Langkun: jika disyahkan maka UU selain ini, termasuk UU Pemberantasan Tipikor diberi waktu 3 tahun utk menyesuaikan
- Asep Iwan Iriawan: keduanya juga mengatur hukum material & hukum acara pemberantasan korupsi yg tidak sinkron dg UU Tipikor

**RUU KUHP dan RUU KUHAP**

- Independensi dan profesionalisme BPK dalam pengawasan keuangan negara lemah
- Dampak: maraknya kasus korupsi dan penyelewengan penggunaan dana APBN, APBD dan keuangan negara lain
- Mulai dari metode perekrutan anggota yang kurang transparan, banyak dari orang partai
- UU nomor 15 tahun 2006 ttg BPK

## **Pengawasan BPK**

- ▣ Mahfud MD: 90% koruptor lulusan sarjana
- ▣ Amanat PP No. 19/2005 ttg standar nasional pendidikan: sekolah segera memasukkan PAK dlm kurikulum pembelajarannya.
- ▣ PAK akan diterapkan selambat2nya 2012.
- ▣ Implementasi kurikulum anti korupsi dimasukkan dlm KTSP yg dirancang sesuai dg kebutuhan sekolah, dg menyusun silabus yg mengakomodasi PAK.
- ▣ PAK dapat diberikan pada mapel sosial/lain

**PAK**

# PAK

- ▣ Maret 2012 Kemendikbud & KPK menanda-tangani MoU utk meningkatkan kerja sama & koordinasi dlm pemberantasan tipikor secara lebih efektif sesuai wewenang masing2
- ▣ Ditjen Dikti & KPK membentuk tim penyusun dari perwakilan PTN maupun swasta utk membuat buku ajar yg berisi materi dasar mata kuliah Pendidikan Anti-Korupsi bagi mahasiswa
- ▣ Mengadakan ToT PAK utk PT
- ▣ Buku Ajar PAK, Modul PAK, SE Dirjen Dikti PAK

- Holloway, 2002: toleransi masyarakat terhadap korupsi meningkat seiring tdk adanya pemahaman yg benar ttg korupsi
- Masyarakat bertindak menurut sistem keyakinan yg dianut
- Ada inkonsistensi sistem keyakinan dn tindakan masyarakat (split of religiosity)
- LSM: ICW, Transparansi Internasional
- Peran agama sbg institusi sosial

## **Partisipasi Masyarakat**

- Secara normatif semua agama mengutuk tindakan korupsi, ia adalah kekuatan moral yg diyakini pemeluknya sbg *the ultimate truth*
- Sbg kekuatan sos agama shrsnya memiliki daya tawar yg kuat thd kekuasaan korup
- Secara historis menunjukkan kemampuan utk memobilisasi warga mencapai tujuan positif misalnya dr kolonialisme

**Agama sebagai institusi sosial**



- Ayzumrdi Azra: bbrp riset menunjukkan tdk ada korelasi signifikan antara religiusitas masyarakat dg angka kecenderungan korupsi
- ICRGI : kecenderungan korupsi tinggi: Pakistan, Meksiko, Filipina, Kolumbia, Argentina , sedangkan Arab Saudi, Malaysia, Iran, Kanada AS, Inggris kecenderungan korupsinya rendah.
- Masalah: mengapa pendidikan agama tdk menunjukkkn signifikansi ajaran agama dlm pemberantasan korupsi?

## Religiusitas dan korupsi